

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION PENURUNAN AKI DAN AKB, STUNTING DAN
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK MELALUI GSIB DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan pembangunan. SDM yang berkualitas ditentukan dari janin sejak dalam kandungan, karena pada masa ini sudah dimulai proses perkembangan otak manusia. Oleh karena itu peningkatan kesehatan ibu hamil dan anak merupakan faktor paling strategis untuk meningkatkan mutu SDM.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi keprihatinan saat ini, dimana berdasar data tiga tahun terakhir AKI terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 76,93/100.000 Kelahiran Hidup (416 kasus), tahun 2020 naik menjadi 98,60/100.000 Kelahiran Hidup (530 kasus), dan tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan menjadi 199/100.000 Kelahiran Hidup (1011 kasus). Bahkan pada tahun 2022 sampai dengan triwulan 3, kematian ibu sebanyak 335 kasus (Sumber : Buku Saku Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah). Data tersebut menunjukkan kecenderungan AKI yang terus mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

Selain itu, yang masih perlu menjadi perhatian kita semua adalah masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada tahun 2019 ada kasus sebanyak 4450 dengan AKB sebesar 8,22/1.000 Kelahiran Hidup, tahun 2020 ada 4189 kasus dengan AKB turun menjadi menjadi 7,79/1.000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2021 ada 3997 kasus dengan AKB 7,87/ 1.000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2022 triwulan 3, terjadi kematian bayi sebanyak 3032 kasus.

Masih adanya status Stunting di Jawa tengah disebabkan antara lain kurangnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang, sehat, dan aman, pola asuh orangtua, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, resiko akibat perkawinan usia anak serta kurang tersedianya akses air minum layak, air bersih dan sanitasi.

Kenaikan Angka Kematian Ibu (AKI), AKB, juga Stunting merupakan refleksi masih adanya ketimpangan gender di tengah masyarakat. Persoalan gender yang tampak dari masih terjadinya AKI dan AKB antara lain : masih kurangnya perhatian laki-laki dalam hal ini suami kepada kehamilan istrinya, masih rendahnya posisi tawar perempuan (istri) kepada suami atau keluarganya, masih adanya budaya patriarki yang sangat kental yang tumbuh di masyarakat, ajaran agama dipahami secara sepotong-potong dan adanya pantangan-pantangan yang tumbuh di masyarakat yang justru merugikan perempuan yang hamil, melahirkan maupun nifas, namun selain itu AKI dan AKB dipengaruhi pula oleh alasan pendidikan, geografis, sosial budaya, ekonomi dan lainnya.

Beberapa penyebab terjadinya AKI, antara lain akibat anemia (kurang darah) pada ibu hamil dapat menyebabkan perdarahan pada saat melahirkan, berat bayi lahir rendah (BBLR), penurunan IQ, bayi mudah terkena infeksi dan mudah menderita gizi buruk, sedangkan dampak sosial ekonomi akibat anemia adalah penurunan produktivitas. Anemia pada ibu hamil dan tingginya AKI mencerminkan rendahnya kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Kematian ibu menyebabkan bayi menjadi piatu yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM akibat kurangnya perhatian, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu.

Pada saat ini banyak kaum remaja tidak mengetahui apa itu kesehatan reproduksi dan kemana dapat memperoleh informasi tersebut. Ketidaktahuan mereka akan kesehatan reproduksi tersebut mempunyai dampak buruk terhadap perkembangan kesehatan reproduksi mereka ke depan. Remaja sekarang lebih berani mengambil risiko atas kesehatan reproduksinya, antara lain diet berlebihan dan perilaku seksual di usia sekolah, padahal dampak buruknya bisa dirasakan ketika mereka hamil. Minimnya informasi kesehatan reproduksi yang diperoleh remaja sering membuat mereka salah dalam mengambil suatu keputusan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penurunan AKI, AKB dan Stunting tidak hanya tergantung pada fasilitas dan tenaga kesehatan saja, tetapi juga membutuhkan adanya sebuah gerakan kepedulian di keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui program dan kegiatan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Termasuk keberadaan Dana Desa diharapkan pula dapat dianggarkan untuk kegiatan yang mendukung percepatan penurunan AKI.

Seperti halnya dengan "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" atau **5Ng**, upaya percepatan menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah adalah melalui **Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB)** yaitu gerakan bersama pemerintah dan masyarakat, untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi menyangkut hak reproduksi perempuan dan hak hidup anak, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya perlindungan agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi. Untuk menurunkan AKI dan AKB serta Stunting, selain 5Ng Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga Memiliki Program "**Jo Kawin Bocah**".

Tujuan GSIB adalah antara lain : Menurunkan AKI dan AKB; Meningkatkan pengetahuan ibu mengenai PMS, HIV/AIDS, Kehamilan, persalinan aman, pemberian ASI Eksklusif, perawatan bayi, aborsi, kesehatan reproduksi remaja, perkawinan usia dewasa dan KB; Memantapkan pengetahuan, wawasan komitmen dan dukungan dari Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota dan Camat), sektor terkait dilingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta tentang berbagai faktor yang berhubungan dengan kematian ibu dan bayi serta melakukan peningkatan penanggulangannya secara terpadu; Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan GSIB dengan meningkatkan partisipasi

masyarakat mulai dari mendeteksi dini bumil di desa/kelurahan, dan proses GSIB lainnya. Sehingga, komponen GSIB yang perlu dikembangkan adalah pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan komitmen pemerintah.

Melihat permasalahan kenaikan AKI, AKB, Stunting dan Perkawinan Usia Anak di Jawa Tengah, Faktor-faktor penyebabnya serta apa tujuan GSIB, memberikan harapan bahwa ketika GSIB diimplementasikan dengan baik dapat berpengaruh bagi upaya penurunan AKI, AKB, Stunting dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memandang perlu untuk menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penurunan AKI dan AKB, Stunting dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui GSIB di Kabupaten/Kota.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
6. DPA Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Program Perlindungan Perempuan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

C. MAKSUD

Focus Group Discussion (FGD) dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi GSIB (Gerakan Sayang Ibu dan Bayi) dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Stunting dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten/Kota.

D. TUJUAN

1. Meningkatkan Pemahaman terkait Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB);
2. Mengidentifikasi Kasus-Kasus Kematian Ibu, Bayi, Stunting dan faktor-faktor penyebabnya di Kabupaten/Kota;
3. Mencegah meningkatnya Perkawinan Usia Anak di Kabupaten/Kota;
4. Merumuskan strategi penurunan AKI, AKB, Stunting dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui implementasi GSIB di Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan sinergi lintas sektor dalam implementasi GSIB di Kabupaten/Kota.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya Pemahaman terkait Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB);
2. Teridentifikasinya Kasus-Kasus Kematian Ibu, Bayi, Stunting dan faktor-faktor penyebabnya di Kabupaten/Kota;
3. Terumuskannya strategi penurunan AKI, AKB, Stunting dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui implementasi GSIB di Kabupaten/Kota;
4. Meningkatnya sinergi lintas sektor dalam implementasi GSIB di Kabupaten/Kota.

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Focus Group Discussion (FGD) Penurunan AKI dan AKB, Stunting dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui GSIB di Kabupaten/Kota akan diselenggarakan pada bulan Februari 2023 bertempat di 3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pekalongan dan kabupaten Demak.

G. PESERTA KEGIATAN

Focus Group Discussion (FGD) Penurunan AKI dan AKB, Stunting dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui GSIB di Kabupaten/Kota sejumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang yang berasal dari Unsur : Dinas PPPA, Forum Anak, Stakeholder terkait dari Desa/Kelurahan dengan AKI tinggi.

H. NARASUMBER/FASILITATOR

Narasumber kegiatan berasal dari Dinas Kabupaten/Kota dan fasilitator kegiatan berasal dari PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Jawa Tengah.

I. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Focus Group Discussion (FGD) Penurunan AKI dan AKB, Stunting dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui GSIB di Kabupaten/Kota dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 pada DPA Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Program Perlindungan Perempuan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

J. PENUTUP

Demikian kerangka acuan Focus Group Discussion (FGD) Penurunan AKI dan AKB, Stunting dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui GSIB di Kabupaten/Kota Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Semarang, Februari 2023

Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang KB, Advokasi dan KIE

